

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

PENYELENGGARAAN-BANGUNAN-GEDUNG

PERDA KAB. BUTON NOMOR 3 TAHUN 2023/LD. NO. 189, TLD. NO. 60 LL BAG HUKUM: 45 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Untuk menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan di daerah maka penyelenggaraan bangunan Gedung dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung dan pembinaan yang terintegrasi dan penguatan pengawasan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan regulasi serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga materi muatannya perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 THN 2023;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Fungsi Bangunan Gedung, Klasifikasi Bangunan Gedung, Prasarana Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung, Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung, Standar Pembongkaran Bangunan Gedung, Standar Penyelenggaraan BGCB yang di lestarikan, Standar Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, Ketentuan Dokumen, Ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Proses Pembinaan melalui SIMBG, Proses Penyelenggaraan, Pemanfaatan, Pelestarian, Pembongkaran, Persyaratan PBG, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, dan Peran Serta Masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 November 2023 dan ditetapkan 1 November 2023.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan: 12 hlm.